

Dr. NASIWAN, M. Si.

TEORI TEORI POLITIK



TEORI
TEORI
POLITIK

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyebarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TEORI
TEORI
POLITIK

NASIWAN, M. Si.

TEORI-TEORI POLITIK

Copyright©Nasiwan, M. Si., 2012

Cetakan I: UNY Press bekerjasama dengan FISE UNY, Yogyakarta, 2007

Diterbitkan kembali oleh Penerbit Ombak (Anggota IKAPI), 2012

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292

Tlp. (0274) 7019945; Fax. (0274) 620506

e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id

facebook: Penerbit Ombak Dua

website: www.penerbitombak.com

PO.276.10/12

Penulis: Nasiwan, M. Si.

Tata letak & Sampul: Dian Qamajaya

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

TEORI-TEORI POLITIK

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012

x + 212 hlm.; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-602-7544-61-1

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS ~ vii

BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI POLITIK ~ 1

- A. Perkembangan Teori Politik ~ 1
- B. Pengertian Teori Politik dan Makna Ilmu Politik ~ 12

BAB II JENIS-JENIS TEORI DAN PENDEKATAN ILMU POLITIK ~ 18

- A. Teori Klasik ~ 18
- B. Teori Behavioralisme ~ 33
- C. Teori Kritis ~ 46
- D. Teori Politik Islam ~ 60

**BAB III SISTEM KEPARTAIAN, SISTEM PEMILU DAN STABILITAS
POLITIK ~ 118**

- A. Partai Politik dan Sejarah Perkembangan
Teori Kepartaian ~ 118
 - 1. Pengantar ~ 118
 - 2. Generasi Perintis dalam Studi Teori Kepartaian ~ 121
 - 3. Generasi Penerus dalam Studi teori Kepartaian ~ 140
- B. Hubungan antara Sistem Kepartaian dengan Sistem Politik
dan Tertib Politik ~ 147

BAB IV TEORI HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT ~ 153

- A. *State and Civil Society* ~ 153
- B. *Civil Society* ~ 157
- C. Teori Pola Hubungan Negara dan Masyarakat Dilihat dari Perspektif Paham Kemajemukan ~ 169
- D. Teoretisasi *Interplay* Proses Kointegrasi Indonesia dengan Struktur Religio-politik Islam ~ 172

BAB V PENUTUP ~ 200

DAFTAR PUSTAKA ~ 202

TENTANG PENULIS ~ 212

PENGANTAR PENULIS

Mempelajari *political science* sangat penting untuk mengenal dan memahami teori-teori politik. Teori-teori politik sangat bermanfaat bagi siapapun yang sedang, telah, atau akan melakukan studi tentang politik. Di antara manfaat tersebut, dengan menguasai teori-teori politik secara baik bagi orang tersebut akan memiliki bekal atau instrumen yang memadai untuk dapat membaca fenomena politik yang terjadi dalam kehidupan politik. Lebih dari itu, jika proses pembacaan terhadap fenomena politik tersebut dilakukan secara periodik—terencana, maka pada saaatnya mahasiswa tersebut akan memiliki kemampuan untuk memprediksi kecenderungan politik yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, melalui pola-pola pencermatan pada fenomena atau peristiwa politik yang terjadi pada masa sebelumnya.

Namun, ada suatu kenyataan bahwa mempelajari teori-teori politik itu membutuhkan ketekunan, kecermatan, jeli-met sehingga beberapa orang yang melakukan studi ilmu politik banyak yang mengalami kejenuhan ketika harus mencermati teori-teori politik yang acap kali normatif, idealis. Akan tetapi sebenarnya di balik kesulitan tersebut tersembunyi hikmah yang sangat besar ketika seseorang mahasiswa berhasil mengatasi hambatan-hambatan

dalam studi terhadap teori-teori politik.

Mengingat dua pertimbangan di atas, kiranya penting sekali suatu buku pegangan tentang teori-teori politik bagi orang yang sedang mempelajari ilmu politik. Buku pegangan dengan gaya bahasa yang sederhana dan konsepsi yang tidak terlalu rumit akan memberikan kemudahan bagi para pemula pelajar ilmu politik.

Buku ini terdiri atas empat bab, Bab I, mengetengahkan uraian tentang sejarah perkembangan teori politik. Bab II, tentang jenis-jenis teori dan pendekatan ilmu politik. Bab III, berbicara tentang teori sistem kepartaian, sistem pemilu dan stabilitas politik. Bab IV, teori hubungan negara dan masyarakat. Penulis dalam mengemukakan pembahasan teori-teori politik mencoba untuk memulainya dari konsep-konsep yang normatif dan berujung pada pembahasan yang memiliki konteks keindonesian. Pada bab terakhir, khususnya ketika mengetengahkan pembahasan tentang hubungan antara negara dan masyarakat dengan mengetengahkan pencermatan pada *interplay* hubungan antara Islam dan negara, penulis berikhtiar untuk membangun suatu konsep yang lebih memiliki konteks keindonesian.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam kepada Drs. Sardiman, A.M., M.Pd. selaku mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi (FISE), UNY atas kebijakan dan motivasinya sehingga buku ini memungkinkan untuk terbit. Terima kasih turut disampaikan kepada Drs. Cholisin, M.Si. dan seluruh teman-teman dosen di Jurusan PKN dan Hukum atas doa, dorongan, dan kesempatan mempertajam pembahasan berbagai topik dalam buku ini. Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah teori-teori politik di Jurusan PKN dan

Hukum, FISE, UNY atas apresiasi dan kesempatan untuk menjadi teman diskusi dan belajar sehingga memungkinkan lahirnya buku ini. Secara khusus terima kasih penulis sampaikan kepada Ikhwan Sismono La Ode yang telah berusaha mengedit buku ini, termasuk Bu Yudi dan Pak Majaji yang turut mempercantik buku ini. Tidak lupa disampaikan terima kasih kepada Mbak Khusnul Aini Azizah dan Mbak Agustin Pramadewi yang telah berbaik hati membenahi naskah awal buku ini.

Kepada segenap pecinta ilmu, khususnya ilmu politik, penulis berharap tegur sapa dan saran yang memungkinkan untuk lebih sempurnanya buku ini. Semoga buku sederhana ini dapat dimanfaatkan mahasiswa dan memberikan kontribusi dalam perjalanan panjang menyusuri perjalanan intelektual. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Dengan iringan doa semoga Allah mencatatnya sebagai bagian dari perjuangan intelektual yang nilainya sepadan dengan tetesan darah para pahlawan. Amien.

Nasiwan, M. Si.

BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN TEORI POLITIK

A. Perkembangan Teori Politik

Perkembangan ilmu politik sebagai disiplin ilmu yang di dalamnya meliputi perkembangan teori politik secara umum mengikuti tahap-tahap: pendekatan tradisional, pendekatan perilaku dan pendekatan pascaperilaku. Teori-teori yang dilahirkan pun mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perubahan yang dialami dalam studi ilmu politik, khususnya perubahan yang terjadi pada adanya pergeseran yang digunakan oleh para pemikir politik dalam menggunakan pendekatan ilmu politik. Pendekatan yang paling awal atau paling kuno biasanya disebut dengan pendekatan klasik atau pendekatan tradisional.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, ilmu politik dibandingkan dengan ilmu yang lainnya dapat dinyatakan sebagai salah satu ilmu yang tertua. Sejak sekelompok orang mulai hidup bersama, masalah yang menyangkut pengaturan dan pengawasan mulai muncul dan sejak itulah para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut lingkup serta

batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah dan diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan akan pengaturan dan pengawasan, sebagai konsekuensi adanya kebebasan pemikiran manusia. Jika hal tersebut yang menjadi fokus dari kajian dalam ilmu politik serta pusat perhatian dari teori-teori politik maka hal itu merupakan tema yang telah menggelitik pemikiran manusia selama berabad-abad yang lampau (Varma, 1995: 3).

Perhatian para teoretikus dan pemikir politik dari zaman ke zaman berikutnya mengalami pergeseran, kiranya dapat disebutkan bahwa para pemikir politik kuno seperti Aristoteles, Plato, lebih memusatkan perhatiannya pada masalah negara yang ideal, sedangkan para pemikir politik abad pertengahan lebih memusatkan perhatiannya pada pengembangan suatu kerangka bagi adanya pendirian Kerajaan Allah di dunia. Para pemikir politik setelah abad pertengahan lebih tertarik pada masalah kekuasaan, wewenang serta pada masa selanjutnya perhatian para pemikir politik terfokus pada masalah kelembagaan.

Pada abad ke-19 para pemikir politik lebih memusatkan perhatiannya pada upaya melacak serta menggambarkan berbagai fenomena politik yang ada atau pada perkembangan lembaga politik yang bersifat khusus dari pada menganalisis fenomena serta lembaga-lembaga tersebut. Pada masa ini pemikiran ilmu politik sangat dipengaruhi oleh aliran ilmu hukum yang bersifat historis. Perkembangan ilmu politik sampai 1853 masih dalam bayang-bayang pengaruh aliran hukum, misalnya terlihat dalam karya monumental *Civil Liberty and Self Government* yang ditulis oleh Francis Lieber. Ilmu politik memperoleh identitas yang jelas, baru pada 1880, yakni ditandai dengan berdirinya *School of Political Science* di Columbia College yang disusul dengan terbitnya jurnal

The Political Science Quarterly pada 1886 atas jasa dari John. W. Burges (Somit, 1967: 21).

Perkembangan dalam pemikiran teori politik mengalami kemajuan pada kuartal pertama abad ke-19, yakni para pemikir politik berhasil melengkapinya dengan perspektif yang bersifat normatif, sedangkan pendekatan sebelumnya yang terbatas pada suatu kerangka kelembagaan yang bersifat legal, dalam pengertian konsep-konsep yang dianalisis selalu dihubungkan dengan lembaga-lembaga yang bersifat legal. Dengan pendekatan yang normatif ini para pemikir politik mulai membahas kelebihan dan kekurangan, keuntungan dan kerugian dari berbagai kelembagaan politik, dengan memperbandingkan antara sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer, sistem pemilihan distrik dengan sistem pemilihan proposional, negara kesatuan dengan negara federal. Pada akhirnya para pemikir teori politik ini mulai menarik kesimpulan mana yang lebih baik, tanpa mengindahkan di mana lembaga-lembaga itu berada suatu negara.

Pada akhir abad ke-19 pemikiran teori politik mengalami perkembangan yang sangat penting dengan terbitnya buku *The American Commonwealth*, ditulis oleh James Bryce, terbit pada 1888. Dalam konteks ini adalah lahirnya kesadaran bahwa untuk pengembangan pemikiran politik yang ideal haruslah berbeda dengan ilmu sejarah yang hanya berkutat pada perpustakaan. Pemikiran dan analisis ilmu politik haruslah berangkat dari lapangan, dalam hal ini Bryce menyatakan bahwa untuk melukiskan lembaga-lembaga serta rakyat Amerika sebagaimana adanya untuk menghindari godaan-godaan yang bersifat deduktif, serta semata-mata untuk menyajikan fakta-fakta dari suatu kasus, maka yang dibutuhkan adalah fakta, hanya fakta.

Pada 1934 dalam buku *Modern Democracies*, Bryce kembali menegaskan proposisinya bahwa terdapat ketetapan dan keseragaman pada berbagai kecenderungan dalam sifat manusia yang memungkinkan kita beranggapan bahwa tindakan seseorang pada suatu saat selalu dikarenakan oleh sebab-sebab yang sama, yang telah pula menentukan tindakan-tindakan mereka pada waktu sebelumnya. Kecenderungan-kecenderungan ini sebegitu jauh selalu sama dan bersifat permanen sehingga kita dapat menarik dalil-dalil tentang sifat dasar manusia yang bersifat umum, serta menyusun dalil-dalil ini dalam suatu sistem ilmu pengetahuan yang tersusun rapi. Dengan adanya perspektif ini pemikiran dalam ilmu politik tidak lagi hanya bersifat spekulatif-dedukif bukan hanya cabang dari ilmu filsafat tetapi benar-benar berangkat dari fakta (Bryce, 1924: 21).

Kemajuan dalam perkembangan teori politik terus terjadi setelah berdirinya APSA (*American Political Science Association*) pada 1903. Lahirnya lembaga ini telah mendorong para pemikir dan analis politik di Amerika Serikat untuk bekerja bagi pengumpulan, pengaturan, penggolongan fakta-fakta mengenai lembaga-lembaga politik dan proses-proses politik. Mulai era ini kiranya dapat dinyatakan bahwa ilmu politik telah berkembang pada pendekatan yang bersifat taksonomi deskriptif. Perbedaan pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik tradisional sebagaimana telah dikemukakan pada uraian sebelumnya, misalnya adanya perbedaan antara pendekatan yang bersifat analitis historis, legal kelembagaan, normatif preskriptif dan taksonomi deskriptif, tidaklah begitu eksklusif satu sama lain dan kadang-kadang justru saling bertemu satu sama lain, dapat dilacak keberadaannya sejak zaman Aristoteles. Pada masa tersebut telah dimulai pengumpulan informasi tentang berbagai macam

konstitusi serta menggambarkan cara kerja dari berbagai tipe pemerintahan yang berbeda.

Masih dalam kerangka pendekatan-pendekatan tradisional, yang dikembangkan oleh ilmuwan politik pada awal abad ke-19 adalah pengembangan lebih luas tentang cara kerja berbagai lembaga politik. Para ilmuwan politik ini mulai menyelidiki masalah di mana pusat kekuasaan terletak dalam suatu masyarakat serta bagaimana pengoperasian kekuasaan tersebut di dalam suatu pemerintahan. Beberapa di antara ilmuwan telah mencoba mengidentifikasi determinan budaya dari berbagai pemerintahan, ilmuwan lainnya telah mempelajari aspek-aspek organisasional secara lebih intensif, daripada yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka. Perkembangan selanjutnya para ilmuwan politik pada abad ke-19 ini memberikan penekanan yang lebih besar kepada analisis unsur-unsur pembuatan suatu kebijaksanaan, serta pada penelitian pada karakter dan tipe-tipe kepemimpinan politik, perubahan pola-pola hubungan antara ideologi dan kepemimpinan, proses-proses pemilihan.

Perkembangan yang terjadi pada 1950-an sebagaimana ditulis oleh Charles Hyneman, lingkup kajian dalam ilmu politik meliputi struktur organisasional, proses pembuatan keputusan dan tindakan, politik pengawasan, kebijaksanaan dan tindakan serta lingkungan manusia dari suatu pemerintahan yang legal. Perhatian dan penekanan pada struktur-struktur yudikatif dan formal, secara perlahan mulai membuka jalan bagi penelitian-penelitian yang terarah secara fungsional. Perhatian yang lebih besar juga dicurahkan oleh para ilmuwan politik kepada pengaruh aktivitas berbagai organisasi nonpemerintah dan kelompok-kelompok sosial terhadap aktivitas pemerintah. Bersamaan dengan perkembangan tersebut muncul pula kecenderungan untuk menggunakan metode-metode yang bersifat empiris

dalam meneliti lembaga-lembaga dan organisasi serta adanya perhatian yang semakin besar kepada apa yang digambarkan sebagai penelitian terhadap suatu sistem dalam keadaan beraksi, "*research on systems-in-action*" (Varma, 1995: 10).

Pada permulaan abad ke-20, kajian dalam teori ilmu politik mulai dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam beberapa tahap penelitian kalangan intelektual. Pada masa ini metode-metode ilmu politik tidak lagi bersifat apriori dan deduktif. Metode-metode modern menunjukkan suatu kecenderungan yang berbeda dalam observasi, survei, dan pengukuran. Hal yang menjadi perhatian adalah penggunaan metode ilmiah, pengukuran fakta yang bersifat kuantitatif. Di antara argumen penting yang dikemukakan adalah bahwa manusia adalah objek penelitian ilmu sosial.

Perkembangan lain yang terjadi pada awal abad ke-20, dalam kajian teori politik adalah adanya kecenderungan untuk lebih memperhatikan ke arah fakta-fakta yang lebih penting, yang dikumpulkan dengan maksud untuk memahami pola dari hal-hal yang berdiri di balik fakta-fakta itu. Perhatian yang lebih besar juga diberikan kepada upaya membuat generalisasi yang bersifat ilmiah, yang didasarkan atas penyelidikan objektif terhadap fakta-fakta tersebut. Sekali pun demikian pada masa ini ilmu politik menjangkau metode-metode pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data yang canggih dan teliti yang dikembangkan pada era berikutnya, yakni era *behavioral*.

Kritik dan ketidakpuasan terhadap pendekatan tradisional ini kemudian hari melahirkan pendekatan baru yang disebut dengan pendekatan behaviorisme. Seiring dengan lahirnya pendekatan baru, maka ilmu politik membutuhkan suatu unit analisis yang baru, metode yang baru, teknik-teknik baru, data-data baru, untuk mengembangkan suatu teori yang sistematis. Seiring dengan

munculnya pendekatan behaviorisme dalam ilmu politik maka perubahan besar dan cepat segera terjadi dalam kajian politik. Dalam konteks ini lembaga-lembaga politik tidak lagi dianggap sebagai unit dasar analisis dan penelitian, sebaliknya penekanan dalam penelitian mengalami perubahan perilaku individu-individu dalam situasi-situasi politik. Pada masa ini perhatian diberikan kepada pemanfaatan rumusan-rumusan yang bersifat statistik dan dapat dikuantifikasikan dan sebagian yang lain berupaya untuk membentuk suatu teori empiris yang bersifat sistematis.

Perkembangan dalam kajian ilmu politik dapat ditemui pada karya Graham Wallas pada 1942 misalnya, ia mencoba menghubungkan kondisi ilmu politik yang tidak memuaskan pada waktu itu dengan masih dipertahankannya konsep-konsep psikologi yang salah dan usang, serta memberikan kritik atas kecenderungan umum yang terjadi yakni bahwa kajian yang dipelajari dalam ilmu politik pada umumnya hanya menganalisis berbagai macam lembaga tetapi mengabaikan faktor manusianya (Wallas, 1942: 19).

Di antara tokoh penting yang berjasa dalam mengembangkan pendekatan behaviorisme adalah Arthur Bentley dan Charles Merriam. Sumbangan Bentley terhadap perkembangan teori politik adalah: *pertama*, gagasan tentang "kelompok" sebagai tingkat kenyataan yang tepat bagi pemahaman serta penelitian politik; *kedua*, konsep tentang proses, sebagai satu-satunya pendekatan yang handal untuk memahami realitas. Bentley berhasil mensintesisakan dua hal, yakni kelompok dan proses dalam karyanya yang berjudul *The Process of Government*. Buku ini merupakan salah satu buku terpenting tentang pemerintahan di Amerika. Bentley adalah seorang ahli teori dan sekaligus metodologi di mana konsepnya tentang proses menentukan

sebagian besar pendekatan perilaku (dari kaum behavioralis). Konsepnya tentang kelompok digunakannya sebagai ilustrasi bagaimana pendekatan teoretisnya dapat digunakan dalam penelitian terhadap realitas politik yang ada (Varma, 1995: 17).

Perkembangan penting dalam kajian ilmu politik terjadi pada 1925, dengan lahirnya buku *New Aspects of Politics*, ditulis oleh Charles Merriam. Buku ini antara lain dapat menunjukkan suatu ciri baru dalam ilmu politik berupa generalisasi-generalisasi yang diungkapkan dalam hubungan-hubungan yang bersifat matematis serta penggunaan metode statistik untuk menguji suatu hipotesis. Merriam menganjurkan sebagian besar tentang tujuan-tujuan yang khas, metode-metode, prosedur-prosedur dan memberikan penekanan bahwa para ilmuwan politik sedang membaaur dengan behaviorisme, serta penekanan tentang pentingnya mengkuantifikasi data serta penemuan yang ada. Merriam membayangkan munculnya suatu tipe ilmu politik dan sosial yang lebih tinggi melalui perilaku seseorang secara halus dapat disetel dan nilai-nilai yang lebih dalam dapat terbuka dengan lebih sempurna. Charles Merriam bersama dengan Thurstone kemudian mendirikan sekolah yang kemudian terkenal dengan "*The Chicago School of Behavioural Political Science*".

Perkembangan ilmu politik behavioral dengan segenap gerakannya yang baru di akhir 1940-an dan awal 1950-an memungkinkan untuk terus berkembang karena mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi donatur besar antara lain Carnegie, Rockefeller, *Ford Foundation*. Yayasan-yayasan ini begitu giat mendukung penelitian-penelitian yang bersifat behavioral dan interdisipliner—berurusan dengan riset-riset empiris. Pada tahap perkembangan ini behaviorisme diinterpretasikan sebagai upaya pembaharuan guna mengembangkan aspek-aspek ilmiah ilmu

politik secara serius, menurut ketentuan-ketentuan ilmu alam dan biologi dan sejalan dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dalam bidang psikologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Secara positif behaviorisme lebih mengutamakan cabang-cabang ilmu sosial yang telah sukses dan maju untuk mempelajari dan mengetahui bagaimana menetapkan berpikir ilmiah serta metode-metode riset yang tepat, memusatkan perhatian pada perilaku yang benar-benar dapat diamati; pada aspek-aspek politik penting, yang dilakukan para aktor dalam kenyataan, mencari, menilai dengan hati-hati serta menguji teori-teori empiris; teori tentang dunia perilaku, mengumpulkan data-data dengan teliti dan lengkap, yang dilakukan dengan pedoman teori dan untuk tujuan-tujuan teoretis.

Pada pertengahan dekade 1960-an, behaviorisme benar-benar merupakan fakta yang telah diterima. Pada 1962 berdiri suatu konsorsium penelitian politik antaruniversitas, di bawah pimpinan Warren Miller, untuk menyediakan suatu pusat pemilihan data bagi SRC (*Social Research Council*), yang diikuti sekitar 19 departemen pada saat lahirnya, dan pada 1967 lebih dari 100 perguruan tinggi dan universitas telah berafiliasi. Konsorsium ini dari tahun ke tahun telah menjadi tempat penyimpanan data yang penting dari berbagai proyek penelitian di bidang politik.

Kemudian seiring dengan berakhirnya 1960-an, behaviorisme menghadapi tantangan-tantangan baru. Kegelisahan intelektual dan pergolakan sosial politik yang menandai kehidupan bangsa Amerika yang menimbulkan tantangan-tantangan tersebut. Tantangan ini erat kaitannya dengan apa yang kemudian disebut dengan gerakan kiri baru (*new left*). Dalam lapangan ilmu politik tercermin dengan upaya mengadakan forum rapat (*caucus*) yang membahas adanya suatu ilmu politik baru. *Caucus* ini benar-benar berpengaruh

dalam APSA, Asosiasi Ilmu Politik Amerika. *Caucus* ini telah terjadi semacam kebulatan suara akan suatu hal bahwa ilmu politik telah mengembangkan beberapa purbasangka Ideologi yang kabur dan tak dapat disangkal lagi, tak dapat dielakan lagi disebabkan oleh pendefinisian umum ilmu politik sebagai suatu ilmu tentang perilaku (*behavioral science*).

Dalam pandangan *caucus* tersebut ilmu politik dinilai telah terus-menerus gagal mempelajari (dalam semangat yang benar-benar kritis) baik krisis-krisis besar yang terjadi pada masa kini maupun kelemahan-kelemahan yang selalu melekat pada sistem politik Amerika. Pada 1969 *caucus* ini mengeluarkan manifesto penting yang antara lain berisi tentang tujuan *caucus* yakni menciptakan suatu ilmu politik yang diarahkan bukan kepada indoktrinasi manusia serta kepada petunjuk-petunjuk keilmuan tetapi kepada pendaftaran ilmu yang mengatasmamakan manusia. Suatu ilmu politik yang dapat melayani kaum miskin, tertindas dan terbelakang dalam perjuangannya melawan hierarki-hierarki kelompok elite serta bentuk-bentuk manipulasi kelembagaan yang telah mapan (Varma, 1995: 47).

Perkembangan kajian dalam ilmu politik setelah dekade 1960-an, pendekatan behaviorialisme, adalah munculnya suatu kajian politik yang kemudian disebut dengan *post-behavioralisme*. Para ilmuwan politik pada era ini tidak hanya menaruh perhatian terhadap masalah keputusan politik yang dibuat oleh negara, tetapi juga terhadap masalah dalam keadaan bagaimana suatu keputusan tidak dilakukan. Permasalahan-permasalahan yang tidak dikemukakan, kekuasaan yang tidak mendapat tantangan, sumber-sumber tenaga yang tidak dimobilisasikan, analisis-analisis yang tidak dikembangkan, kini dianggap mempunyai arti

penting yang menentukan untuk memahami proses-proses politik (Bachrach, 1963: 632).

Istilah "*post-behavioral*," digunakan untuk membentuk suasana hati serta maksud-maksud pragmatis dari bencana-bencana baru. Dalam kaitan ini para ilmuwan politik yang tergabung dalam pendekatan ini, memiliki kecenderungan-kecenderungan adanya penekanan baru pada nilai-nilai dalam masalah keadilan, kebebasan dan persamaan. Ada semacam koreksi terhadap pendefinisian ilmu politik secara sempit dan terlalu diidentifikasi dengan tatanan yang sudah mapan. Seharusnya para ilmuwan politik tidak hanya memberikan perhatian pada masalah kebijaksanaan umum dan reformasi politik, tetapi juga benar-benar terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan rekonstruksi sosial dan politik secara radikal.

Para ilmuwan politik sampai pada satu kesadaran bahwa mereka telah terlalu banyak waktu dan energi terbuang, untuk penelitian-penelitian yang dangkal dan sering tidak relevan. Sementara mereka terlibat dalam pembuatan beberapa paradigma, kerangka konseptual, model-model, teori-teori dan meta teori; dunia tengah menghadapi krisis-krisis sosial, ekonomi, dan budaya yang kian parah, dan mereka tampaknya kurang menyadari hal tersebut. Sementara mereka bekerja dengan tekun dalam perpustakaan, di dalam menara gading kampus universitas yang eksklusif. Mereka memikirkan masalah stabilitas, ekuilibrium, pola-pola pemeliharaan dan sebagainya dengan bidang pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pada skala-skala, indeks-indeks, serta teknik-teknik khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data; masyarakat di luar mereka dalam keadaan kacau, tercerai-berai dan macet. Mereka mulai mempertanyakan apa gunanya pengembangan teknik-teknik yang memadai, peralatan riset yang canggih, bila para ilmuwan politik tidak mampu memahami

masalah sosial dan politik yang terjadi pada waktu itu. Haruskah kita terikat selamanya kepada suatu bayangan yang tak pernah berubah tentang suatu disiplin, baik itu behavioral atau yang sebaliknya? (Kariel, 1972).

Perkembangan kajian dalam teori ilmu politik setelah dekade 1970-an yang kemudian terkenal dengan era *post-behavioralisme* terfokus pada dua tuntutan yakni relevansi dan tindakan. Para ilmuwan politik di era ini memiliki karakter yang dikenal dengan "*the credo of relevance*" dengan tujuh karakter yakni: 1) penelitian politik substansi harus mendahului teknik; 2) ilmu politik hendaknya memberikan penekanan pada perubahan sosial bukan pada pemeliharaan sosial; 3) tanggung jawab para ilmuwan politik untuk ikut memikirkan kebutuhan manusia yang sesungguhnya; 4) para ilmuwan politik perlu memberikan perhatian pada sistem nilai karena pada landasan sistem nilai inilah semua ilmu pengetahuan berdiri; 5) mengingatkan para ilmuwan politik sebagai kaum intelektual akan peranan yang harus dimainkan dalam masyarakat sebagai usaha melindungi peradaban nilai-nilai kemanusiaan; 6) menghendaki adanya suatu ilmu politik yang mempunyai komitmen untuk bertindak '*action science*'; 7) berusaha menentukan tujuan yang pantas bagi masyarakat dan membuat masyarakat bergerak sesuai dengan tujuan tersebut. Ditarik suatu kesimpulan bahwa politisasi profesi, asosiasi, dan universitas-universitas sangat diperlukan untuk mencapai tujuan mengarahkan perubahan yang pantas dalam masyarakat (Varma, 1995: 100).

B. Pengertian Teori Politik dan Makna Teori Politik

Teori mempunyai kedudukan amat penting dalam penjelasan ilmiah, teori juga memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam kegiatan penelitian. Demikian juga dengan apa yang

disebut dengan teori politik. Orang membutuhkan teori politik dan menguasainya dengan baik agar dapat membaca, memahami, menjelaskan fenomena politik yang terjadi dalam kehidupan politik. Untuk memahami lebih mendalam tentang pengertian teori politik, berikut ini diketengahkan definisi teori politik, menurut pandangan beberapa ahli.

Secara sederhana teori sebagaimana dikemukakan oleh Riswanda Imawan, dapat dipahami sebagai *organized system of concepts* (konsep-konsep yang terorganisir). Pemahaman teori sebagaimana dikemukakan di atas masih umum. Definisi yang lebih fokus dikemukakan oleh Blalock (1969), menurutnya teori adalah "*a set of propositions that explain of social phenomenon,*" (satu rangkaian proposisi yang menjelaskan satu fenomena sosial). Sementara itu, Baily (1982) menyatakan bahwa teori adalah "*set of propositions that attempts to explain and to predict a particular phenomenon and that proposition is testable,*" (teori adalah seperangkat proposisi yang mampu menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena khusus dan karenanya proposisi tersebut dapat diuji) (Imawan, 2001: 1-2).

Definisi yang dibuat oleh Baily ini memberikan pemahaman bahwa teori itu memiliki dua fungsi yaitu untuk menjelaskan fenomena dan memiliki kemampuan untuk memprediksi fenomena. Dengan rumusan lain dapat dinyatakan bahwa kualitas ataupun bobot sebuah teori dilihat dari seberapa jauh proposisi yang diformulasikan mampu menjelaskan fenomena sosial-politik yang terjadi, misalnya menjawab mengapa suatu *regime* (pemerintahan) tertentu mengalami kejatuhan? Mengapa pada Pemilu Presiden 2004 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Jusuf Kalla (JK) keluar sebagai pemenang? Padahal dia berasal dari partai baru yang kecil dukungannya.

Lebih dari itu, teori (politik) juga diuji dari apakah teori tersebut mampu memberikan prediksi, misalnya tentang bagaimana masa depan pemerintahan yang dipimpin oleh SBY-Kalla? Dengan mempertimbangkan faktor-faktor politik yang terkait serta pola-pola hubungan antara partai politik yang ada di parlemen dengan wakil tokoh partai yang ada di pemerintahan.

Definisi yang lebih menyeluruh tentang teori dikemukakan oleh Di Renzo (1969: 11). Menurutnya teori adalah *"a set of interrelated constructs (concepts), definitions and propositions that presents a systematic view of phenomenon by specifying relations among variables, with the purpose of explaining and predicting the phenomenon"* (teori adalah serangkaian hubungan antarkonsep, proposisi, definisi, dan variabel dalam satu sistem berpikir yang terorganisasi secara sistematis dan komprehensif untuk menjelaskan dan meramalkan satu gejala). Merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Di Renzo, dinyatakan bahwa suatu teori tidak hanya merupakan hubungan antara konsep atau proposisi, tetapi dipersyaratkan adanya hubungan yang sistematis (*"that presents a systematic view of phenomenon"*) yakni cara pandang (membaca) fenomena dengan sistem atau pola-pola tertentu, misalnya menunjukkan pada kejelasan adanya hubungan sebab akibat dari elemen-elemen yang digunakan saat membangun satu teori (Imawan, 2001: 3).

Kiranya perlu untuk diperhatikan bahwa proses pembentukan teori (*theory building*) sangat erat kaitannya dengan konseptualisasi dan generalisasi. Konseptualisasi itu bukan hanya penting untuk menata fakta hasil pengamatan, tetapi lebih dari itu, konseptualisasi yang jelas sangat penting dalam proses perumusan proposisi teoretis, karena perumusan proposisi itu pada dasarnya

adalah upaya menghubungkan konsep-konsep dalam satu format yang bermakna. Dalam pengertian ini, konsep dianggap sebagai batu bata bagi bangunan yang disebut teori. Sebagai batu bata, konsep sangat vital bagi bangunan teori itu. Konsep yang lemah, yaitu yang tidak dirumuskan dan didefinisikan dengan jelas akan menghasilkan bangunan teori yang rapuh (Mas'ood, 1994: 184).

Sebagaimana akan dibahas pada uraian selanjutnya pada pembahasan ini, perlu dicatat bahwa teori merupakan bentuk penjelasan paling umum yang memberitahu kita mengapa sesuatu terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Jadi, selain dipakai untuk eksplanasi, teori juga menjadi dasar bagi prediksi. Ilmuwan menggunakan konsep (atau nama) untuk mengorganisasikan dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian mereka, dalam hal ini teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagai-mana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.

Kata *teori* berasal dari bahasa Yunani (*theoria*, θεωρία) yang artinya 'melihat' atau 'memperhatikan'. Dari pengertian ini secara sederhana dapat dinyatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Jadi, berteori adalah "pekerjaan penonton", yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian di masa depan.

Berkaitan dengan penggunaan kata *teori* dalam studi ilmu politik ada kerancuan dengan filsafat politik. Kiranya perlu dikemukakan bahwa dalam disiplin ilmu politik terdapat bidang studi yang disebut "teori politik." Studi ini bersifat normatif, yaitu memusatkan pada pertanyaan yang bersifat *das Sollen*: apa yang seharusnya menjadi tujuan politik nasional? Sistem politik nasional

apakah yang paling baik? Bagaimana sebaiknya hubungan antara negara-negara kaya dan miskin di dunia? Karena itu yang dipelajari adalah hasil pemikiran atau karya pemikir besar seperti Hugo Grotius, Immanuel Kant, Nicollo Machiavelli, Thomas Hobbes, Karl Marx. Bidang yang seharusnya disebut filsafat politik itu dalam kurikulum ilmu politik sampai sekarang masih disebut dengan Teori Politik (Masoed, 1994: 184). Dengan demikian, adalah tidak tepat kalau memandang bahwa teori tidak terkait dengan dunia empirik—teori berkaitan dengan pertanyaan yang bersifat *das sein*, tentang hal yang senyatanya.

Jadi, dalam konteks ini yang dimaksud dengan teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan “mengapa”, artinya berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Pernyataan yang disebut teori itu berujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bisa juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis. Namun, teori bukan sekadar kumpulan generalisasi. Akan tetapi teori adalah pernyataan yang menjelaskan generalisasi itu. Sebagai sarana eksplanasi, teori adalah yang paling efektif. Dalam proses eksplanasi tersebut teori membantu mengorganisasikan fakta yang diteliti. Dalam kaitan ini, McCain dan Segal mendefinisikan teori sebagai serangkaian *statement* yang saling berkaitan dengan:

- 1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu;
- 2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep-konsep dasar itu satu sama lain;
- 3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa *statement* teoretis itu dengan sekumpulan kemungkinan objek pengalaman empirik, yaitu hipotesis (Masoed, 1994: 187).

Teori dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup, yakni teori mikro dan teori makro; berdasarkan jangkauan, yakni *middle-range* atau *grand-theory*; dan berdasarkan tingkat-tingkatannya atau berdasar struktur internalnya. Berbagai proposisi teoretis yang dikenal dalam ilmu sosial sebenarnya memiliki kadar teoretis yang bervariasi. Berdasarkan kadar teori yang dimuatnya, bisa dibedakan ke dalam tiga tingkatan proposisi yaitu; sistem klasifikasi (tipologi atau taksonomi), kerangka konseptual, dan sistem teoretis (teori).

BAB II

JENIS-JENIS TEORI DAN PENDEKATAN ILMU POLITIK

A. Teori Klasik

Kekuasaan-kekuasaan untuk membentuk kehidupan telah digunakan secara bijak sejak lama sehingga lahirlah kota-kota kuno yang dalam sejarah peradaban umat manusia yang lazimnya merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Kota-kota kuno tersebut merupakan hasil interaksi perdagangan antarbangsa, ekspansi megapolis, *creatives social minority* dan *colonialism* yang merupakan kekuatan-kekuatan sejarah yang membidani proses kelahiran kota-kota kuno.

Sebuah paradigma mengistilahkan bahwa rakyat berakal sehat, mereka dapat dikatakan seperti itu bila mereka dihidupkan dalam lembaga-lembaga politik yang sesuai. Pengetahuan politik di kala itu disimbolkan dengan pengejawantahan moral yang lahir dari upaya filosofis kehidupan individu dan masyarakat. Pengejawantahan inilah yang memproyeksikan tujuan suatu komunitas bila penguasa dan rakyat berkeyakinan sama dalam maksud dan tujuan, serta menyepakati metode-metode pemerintahan yang berlaku. Pada intinya model politik normatif